

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**



**TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

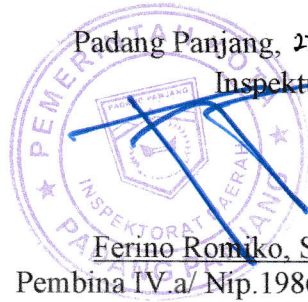
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2026

Inspektur,



Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol yang dihasilkan di tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, impelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik dengan indikator Indeks Harmoni dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik;
2. Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana;
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol, terdiri atas 3 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase Konflik Tertangani
2. Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penagulangan Bencana Terpadu
3. Nilai AKIP BPBD Kesbangpol

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Dalam situasi perubahan iklim yang sudah terjadi, kinerja program penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik Kota Padang Panjang yang bermuara pada penurunan risiko bencana dan sekaligus peningkatan kapasitas ketahanan daerah menjadi isu strategis pelaksanaan pembangunan
- b. Menguatnya kesadaran para pihak tentang pengurangan risiko bencana dalam pembangunan yang berlandaskan kesadaran pembanguan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang rendah emisi secara berkelanjutan dan berkeadilan.
- c. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang

- politik dan penyelenggaraan sistem pemilukada serentak.
- d. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

Faktor Penghambat

A. Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang baik secara kuantitas maupun kualitas serta keterbatasan sumber daya peralatan pendukung.
2. Keterbatasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) adaptasi dan mitigasi bencana khususnya yang berkaitan langsung dengan adaptasi dan mitigasi bencana non struktur
3. Rendahnya pemahaman tentang kesiapsiagaan dan kemampuan untuk penanganan darurat bencana
4. Fokus pelayanan penanggulangan bencana yang terpusat pada pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana yang cenderung mengabaikan dimensi sosial, budaya dan ekonomi
5. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya pengurangan risiko bencana
6. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas baik dalam bidang penanggulangan bencana daerah maupun kesatuan bangsa dan politik

B. Eksternal

1. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengurangan risiko bencana baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (fenomena lingkaran setan);
2. Lemahnya semangat pengarusutamaan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana pada berbagai OPD terkait lainnya;
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan politik masyarakat, sosial, ekonomi serta keamanan dan ketertiban

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

1. Penguatan Koordinasi dan Komando melalui Rapat Kordinasi rutin lintas sector (BPBD, TNI/Polri, Dinkes, Relawan, NGO) agar tidak ada duplikasi tugas serta keputusan lebih cepat
2. Penguatan Kapasitas SDM /personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan politik;
3. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Kesbangpol ke depan, sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar lintas instansi pemerintah sekaligus untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan
2. Perubahan paradigma penganggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah karna pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan apabila terjadi darurat bencana.
3. Keterlibatan pihak swasta baik local maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang menyajikan aktifitas pelaksanaan kinerja di Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang sedang berjalan .

Berkat rahmat dan kurnia Allah SWT, dukungan pimpinan dan kerjasama staf dengan peran serta dari semua bidang LKJIP ini dapat diselesaikan.

Untuk itu atas bantuan dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, 18 Februari 2026

Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Padang Panjang



Dian Eka Purnama, S.E., M.Si.

Pembina Tk. 1, IV/b, NIP. 19760725 200312 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja.....	2
1.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang No. 21 Tahun 2010.....	4
1.4 Sumber Daya.....	5
1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	16
1.5 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.....	27
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan (berdasarkan RPD/ Renstra 2024-2026).....	27
3.1.2. Capaian Kinerja Organisasi setelah perubahan (berdasarkan RPJMD/ Renstra 2025-2029).....	33
3.2. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP.....	63
1. Permasalahan dan Kendala Utama.....	63
2. Strategi Pemecahan Masalah dan Rekomendasi ke Depan.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	5
Tabel 1. 2 Tingkat Eselonering	6
Tabel 1. 3 Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1. 4 Tingkat Kepangkatan	6
Tabel 1. 5 Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025	7
Tabel 1. 6 Sarana dan prasarana BPBD Kesbangpol Tahun 2025.....	9
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang	23
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra	27
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang berdasarkan Restra 2024-2026	31
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra Berdasarkan Renstra 2024-2026	32
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	33
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang berdasarkan Restra 2025-2029	38
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	39
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah bagi yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Perwako No 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan penanggulangan bencana daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan wujud kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Penangggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun mendatang.

1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang BPBD Kesbangpol. Pada Tahun 2010 Peraturan Daerah tersebut diganti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :

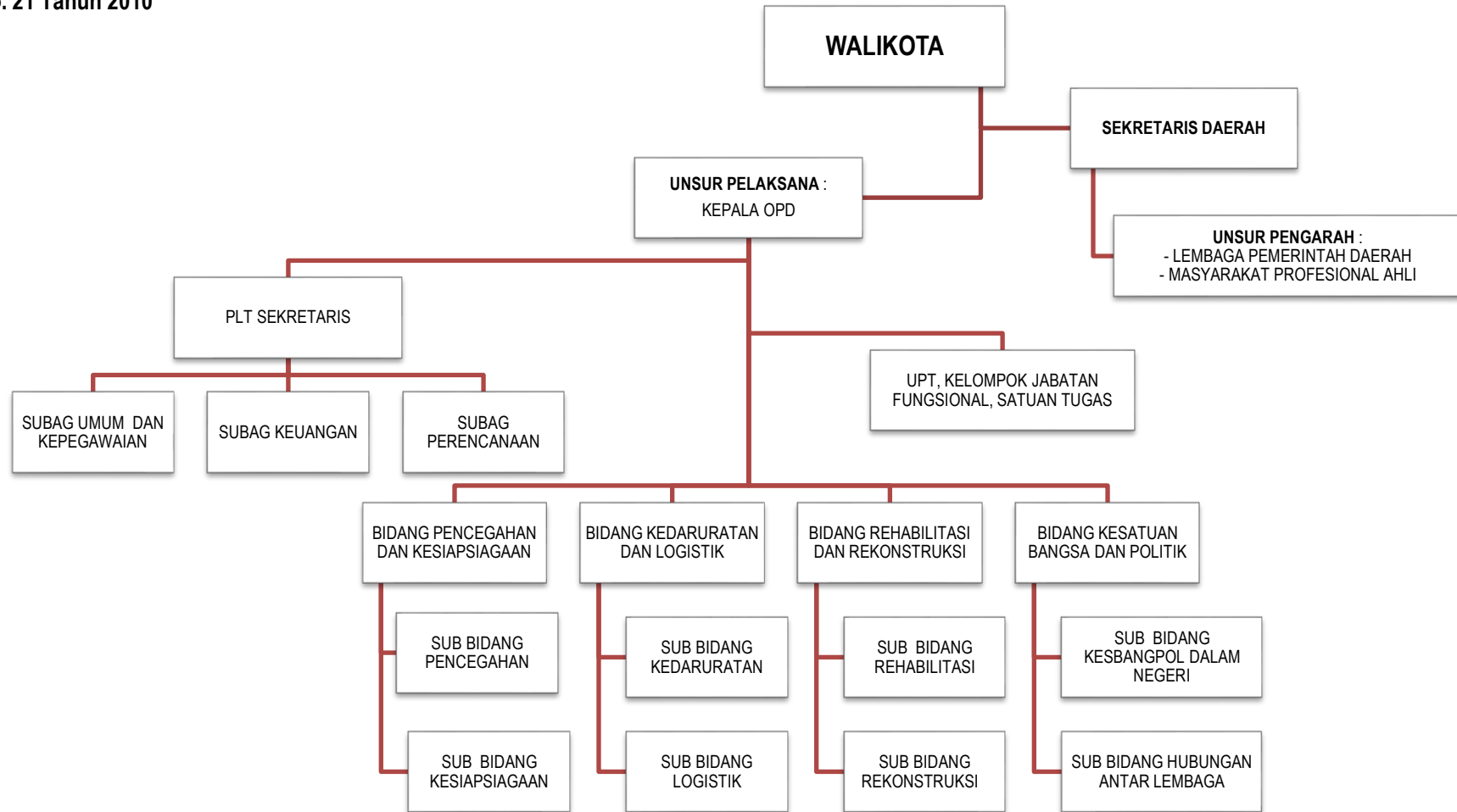
(1) Tugas BPBD, Kesbangpol:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi BPBD, Kesbangpol sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan, pengawasan di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang hubungan antar, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

1.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang No. 21 Tahun 2010



1.4 Sumber Daya

A. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi penggunaan SDM pada BPBD Kesbangpol adalah tingkat optimalisasi pemanfaatan pegawai dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan pembinaan ketahanan masyarakat sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai tanpa pemborosan tenaga kerja, waktu, maupun anggaran. Penempatan personil disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan operasional di lapangan.

Sumber daya manusia yang merupakan Personalia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga Harian Lepas (THL) jumlah personil yang ada sebanyak 59 orang dengan rincian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 29 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) 30 orang.

Efisiensi SDM di BPBD Kesbangpol dapat dilihat dari beberapa aspek:

- Pembagian tugas sesuai fungsi kebencanaan dan kesbangpol sehingga tidak terjadi tumpang tindih
- Optimalisasi personel meskipun Jumlah pegawai yang terbatas dapat menangani kegiatan penanggulangan bencana, deteksi dini konflik, dan pembinaan masyarakat

Koordinasi lintas OPD dengan memanfaatkan kolaborasi dengan **OPD** lain seperti kesehatan, PU, Dinas Perhubungan dan Satpol PP

- Pemanfaatan teknologi melalui Penggunaan sistem informasi kebencanaan dan komunikasi cepat untuk mempercepat respon tanpa menambah personel

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	18 orang	8 orang
2.	PPPK	5 orang	2 orang
3	Tennaga Harian Lepas (THL)	20 orang	2 orang
	Jumlah	43 orang	12 orang

Sumber: Data kepegawaian BPBD Kesbangpol Tahun 2025

Tabel 1. 2
Tingkat Eselonering

No	Eselonering	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II b	1 orang	-
2.	Eselon III a	1 orang	-
3.	Eselon III b	3 orang	1 orang
4.	Eselon IV a	4 orang	6 orang
	Jumlah	9 orang	7 orang

Sumber: Data kepegawaian BPBD Kesbangpol Tahun 2025

Tabel 1. 3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Strata 2	5 orang	2 orang
2.	Strata 1	6 orang	5 orang
3.	Diploma 3	3 orang	-
4.	SLTA	29 orang	5 orang
	Jumlah	43 orang	12 orang

Sumber: Data kepegawaian BPBD Kesbangpol Tahun 2025

Tabel 1. 4
Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda / IV c	-	1 orang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
2.	Pembina Tk. I / IV b	1 orang	-
2.	Pembina / IV a	2 orang	1 orang
3.	Penata Tk. I / III d	4 orang	4 orang
4.	Penata / III c	1 orang	-
5.	Penata Muda Tk. I / III b	-	1 orang
6.	Penata Muda / III a	4 orang	-
7.	Pengatur Tk. I / II d	3 orang	-
8.	Pengatur / II c	2 orang	-
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	1 orang	-
10.	Pengatur Muda / II a	-	1 orang
11.	PPPK Gol. IX	1 orang	-
12.	PPPK Gol. V	4 orang	2 orang
15.	Tenaga harian lepas	20 orang	2 orang
	Jumlah	43 orang	12 orang

Sumber: Data kepegawaian BPBD Kesbangpol Tahun 2025

Tabel 1. 5
Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Sumber Daya Manusia yang Kompeten	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang ada	Kekurangan: Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Belum terlaksana, karena anggaran peningkatan SDM terpusat di BKPSDM dan tidak ada pembagian peruntukan secara proporsional dan urgensi masing-masing diklat dan Bimtek.
Ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan: Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kegiatan operasional dan kebencanaan	Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional dan kebencanaan masih belum memadai	Kekurangan: Kekurangan jumlah kendaraan untuk mendukung kegiatan kebencanaan karena terjadi	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan peralatan dan mesin lainnya secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.

		penarikan asset, kekurangan mobil tangki air bersih, perlengkapan evakuasi (mantel, helm, sepatu bot)	
--	--	---	--

Sumber: BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025

B. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dengan dukungan alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Realisasi Anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan tercapainya sebagian besar target kinerja meskipun terdapat penghematan pada beberapa komponen belanja. Prioritas penggunaan anggaran diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Efisiensi anggaran dicapai melalui perencanaan berbasis kebutuhan riil, pengendalian belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan kolaboratif.

C. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Efisiensi sarana dan prasarana adalah tingkat optimalisasi penggunaan fasilitas kerja, peralatan kebencanaan, dan infrastruktur pendukung yang dimiliki BPBD Kesbangpol dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan tepat guna.

Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada BPBD Kesbangpol tercermin dari optimalnya pemanfaatan fasilitas kebencanaan dan fasilitas operasional dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan pembinaan ketahanan daerah.

Pemanfaatan peralatan kebencanaan atau Peralatan tanggap darurat seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi dimanfaatkan secara maksimal saat terjadi bencana. Meskipun sarana yang tersedia relatif terbatas, seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan fasilitas untuk menjaga kondisi agar tetap siap digunakan. Pemanfaatan sarana prasarana juga dilakukan secara terpadu dengan OPD lain seperti Damkar, Dinas Kesehatan, dan PUPR.

Hal ini memungkinkan pencapaian indikator kinerja seperti **persentase konflik tertangani, dan cakupan wilayah sistem penanggulangan bencana terpadu** secara efektif.

Tabel 1. 6
Sarana dan prasarana BPBD Kesbangpol Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	A.C. Split	1	5.950.000				
2	Alat kantor lainnya	21	46.869.750				
3	alat komunikasi telephone lainnya				1	1.980.000	Rusak Berat
4	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	2.530.000		3	3.795.000	
5	Alat Pemadam/Portable (dst)	21	112.931.000				
6	Alat Pembantu Kebakaran	5	204.309.060				
7	Alat Penghancur Kertas	1	5.000.000				
8	Alat Penjemih Air	1	49.527.500	Hibah			
9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	47.184.400		1	950.000	Rusak Berat
10	APAR Tabung Pemadam	8	6.000.000				
11	Auto Stop, alat kedokteran gawat darurat lainnya	1	2.600.000				
12	Auto Stop, Alat Pembantu Kebakaran	2	3.560.000				
13	Auto Stop, alat penolong lainnya	1	1.800.000				
14	Baju Tahan Panas Pemadam Kebakaran	4	88.843.750				
15	Bemo	2	14.000.000				
16	Box Snekel	1	1.500.000				

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
17	Brandkas	1	2.500.000				
18	Buffet Kaca	2	14.000.000				
19	Camera Electronic	1	9.400.000		1	7.370.000	
20	Camera Film				1	4.000.000	Rusak Berat
21	Camera Video	1	11.300.220		1	3.800.000	Rusak Berat
22	CCTV, alat keamanan lainnya	1	27.300.000				
23	CCTV, peralatan studio audio lainnya	4	1.600.000				
24	Concreta Mixer/Penumbuk Beton	1	1.309.000	Hibah			
25	Cottosow / Mesin Potong, Alat Pembantu Kebakaran	1	58.226.000				
26	Crol, Alat Pembantu Kebakaran	1	1.280.000				
27	Facsimile	1	2.450.000				
28	Filing Cabinet Besi	12	23.010.000		1	2.000.000	Rusak Berat
29	Film Projector				1	1.780.000	Rusak Berat
30	Full Body Hermes	2	2.850.000				
31	Generator Set (Lab Scale)	1	34.800.000				
32	Genset	3	37.650.000				
33	Gergaji Chain Saw	8	47.360.000				
34	Gergaji Chain Saw	15	25.399.580	Hibah			
35	Gordyin/Kray	7	71.700.000				
36	GPS Map	1	5.794.490				

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
37	Handy Cam				1	8.729.170	Rusak Berat
38	Handy Talky (HT)	19	32.097.860		11	26.172.140	Rusak Berat
39	Hard Disk	1			1	2.000.000	Rusak Berat
40	Hardness Test Machine	1	950.000				
41	Helmet	25	19.500.000				
42	Infokus	1	12.950.000				
43	Karpet	81	35.600.000				
44	Kasur/Spring Bed	26	28.600.000				
45	Kendaraan roda 6	1	410.000.000	Hibah			
46	Kendaraan roda 2	12	167.992.000				
47	Kendaraan roda 4 Jeep	1	480.271.000	Hibah			
48	Kendaraan roda 4	6	1.549.400.010				
49	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	852.000				
50	Komputer Jaringan lainnya	3	38.031.500				
51	Komputer Unit Lainnya	2	4.171.860				
52	Kursi dan Meja 1 set Kerja Pejabat Eselon II	1	12.200.000				
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	18.040.000				
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	24.299.500		3	4.332.530	Rusak Berat
55	Kursi Putar	11	15.264.000		6	6.420.000	Rusak Berat
56	Kursi Rapat	4	15.603.840		2	15.271.850	Rusak Berat
57	Lampu panel surya	1	21.978.000	Hibah			

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
58	Lampu sorot Petak	1	3.000.000	Hibah			
59	Lap Top	10	122.300.000		1	12.500.000	Rusak Berat
60	Layar Film/ Projector	3	26.420.000		1	21.000.000	Rusak Berat
61	Lemari Besi/Metal	2	3.700.000				
62	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	10.200.000				
63	Lemari Kayu	10	29.045.000				
64	Lensa Kamera	1	21.392.000				
65	Light tower portable	3	1.290.000.000	Hibah			
66	Lighting Mechanic	3	157.740.000	Hibah			
67	Loudspeaker	1	7.400.000				
68	Marco Cender, alat penolong lainnya	2	2.650.000				
69	Meja 1/2 Biro	12	50.641.820		4	5.493.930	
70	Meja Kerja Kayu	1	2.500.000				
71	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	3.800.000				
72	Meja Pimpong, Alat Tenis Meja	1	2.500.000				
73	Meja Rapat	18	27.895.000		12	16.800.000	Rusak Berat
74	Meja Tambahan	5	19.963.320				
75	Mesin Absensi	2	6.784.700		2	4.617.690	Rusak Berat
76	Mesin Bor Tangan	2	3.140.000				
77	Mesin Cuci	1	10.600.000				
78	Mesin Gergaji	7	31.000.000				

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
79	Mesin Gerinda Tangan	2	1.640.000				
80	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1			1	1.215.000	Rusak Berat
81	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	2.927.050				
82	Mesin Kompresor	4	6.200.000				
83	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1.655.000				
84	Meubeleur lainnya	25	31.250.000				
85	Microphone	2	3.450.000				
86	Microphone Table Stand	8	7.900.000				
87	Microphone/Wireless MIC	1	4.000.000				
88	Mikro Sender, Alat Pembantu Kebakaran	1	1.135.000				
89	Note Book	5	48.505.000		2	14.554.530	
90	P.C Unit	17	158.299.460		1	8.486.480	
91	Papan Nama Instansi	1	1.500.000				
92	Papan Pengumuman	1	4.000.000				
93	Papan Visual/Papan Nama				1	5.200.000	
94	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	2	165.715.000	Hibah	1	38.654.000	Hibah, Rusak Berat
95	peralatan antena uhf lainnya (dst)	1	3.000.000				
96	peralatan mainframe lainnya	3	14.448.000				
97	peralatan pemancar vhf/fm	1	3.500.000				

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	lainnya						
98	perkakas bengkel listrik lainnya	2	6.250.000				
99	Perkakas Pengecatan Kendaraan	1	92.500.000				
100	Pesawat Telephone	1			1	16.500.000	Rusak Berat
101	pompa alkon	5	572.500.000	Hibah			
102	Portable Generating Set	8	67.600.000	Hibah			
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	45.604.000		8	15.049.560	Rusak Berat
104	Professional Sound System	1	11.523.200				
105	Pulay DouBLE, alat penolong lainnya	2	2.400.000				
106	rambu bersuar lainnya	1	12.361.150				
107	Rambu Jalan	1	49.565.000				
108	rambu tidak bersuar lainnya	2	49.000.000				
109	Rambu-rambu Peringatan	3	30.000.000				
110	Repiter, alat komunikasi radio vhf lainnya	1	39.694.000				
111	RIG, alat komunikasi telephone lainnya	1	6.572.500	Hibah			
112	Router	1	3.873.100				
113	Scanner				1	2.500.000	Rusak Berat
114	Senter Rescue Alat Pemadam Kebakaran	1	23.705.000	Hibah			

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	lainnya						
115	Sepatu Safeti Pemadam KEBAKARAN	10	7.500.000				
116	Sinsaw Besar	3	14.991.000		2	9.994.000	Rusak Berat
117	Slinger	1	4.750.000				
118	Sofa	2	20.750.000				
119	Sound System	1	18.645.000				
120	SSB, alat komunikasi telephone lainnya	1	18.975.000	Hibah			
121	Tandu Basket	2	10.100.000				
122	Tandu lipat	1	1.400.000				
123	Tandu Skop	1	2.600.000				
124	Tangga Aluminium	3	12.050.000				
125	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	46	611.689.650				
126	Televisi	5	51.297.210				
127	Tenda	2	42.647.210				
128	Tenda	80	1.399.044.000	Hibah			
129	Tool Kit Box	10	18.150.000	Hibah			
130	Tool Kit Set	1	3.465.000				
131	Unit Pemancar MF/MW Portable	1	2.500.000				
132	Unit Power Supply	2	4.679.170				
133	Unit Tranceiver FM				2	5.400.000	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah asset yang tidak terpakai		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
134	Unit Tranceiver Ssb Portable				1	5.000.000	Rusak Berat
135	Unit Tranceiver VHF Transportable	1	8.000.000				
136	Velbed, Alat Kantor Lainnya	19	15.908.408		1	1.459.490	Rusak Berat
137	Veld Bed, Alat sar lainnya lainnya	70	84.490.000	Hibah			
138	Video Mixer	1	4.950.000				
139	Video Printer				2	2.677.470	Rusak Berat
140	Voice Recorder	1	2.500.000				
141	White Board	9	9.717.840				
142	Wireless	1	7.684.000				
	T o t a l		9.541.764.108			275.702.840	

Sumber : Pengurus Barang BPBD Kesbangpol

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

1. Kekuatan (Strengths).

a) Struktur Organisasi yang jelas dan lengkap

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Kepala, Sekretariat dan Bidang-Bidang.
- Tugas dan Fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam LKJIP.

b) Realisasi Anggaran tinggi.

- Realisasi Anggaran mencapai 98,75% menunjukkan efisiensi dalam penggunaan Anggaran.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik telah menerapkan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif dalam pengelolaan Anggaran

c) Pendampingan dan Asistensi Kepada Masyarakat.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanggulangan Bencana dengan strategi Sebagai berikut:
- Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana
- Meningkatnya Responsifitas dalam Penanganan Bencana
- Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien untuk Semua Aspek Pelayanan Masyarakat
- Berkurangnya konflik di masyarakat

2. Kelemahan (Weakneses)

a) Kualitas Sumber Daya Manusia

b) Fasilitas Sarana Prasarana

c) Keterbatasan Anggaran

- Kualitas SDM untuk Penanggulangan bencana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum memadai dan belum memiliki Sertifikasi dari Basarnas.
- Fasilitas Sarana prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik masih kurang memadai kurang maksimal.
- Keterbatasan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Penanggulangan bencana.

3. Peluang (Opportunities).

▪ Pelatihan dari Pemerintah

Pelatihan di perlukan untuk terus meningkatkan kualitas dari Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dari pemerintah untuk bagian Penanggulangan Pasca bencana proses pengkajian dan penilaian kerusakan , kerugian dan kebutuhan yang dilakukan melalui pengkajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA).

▪ Dukungan OPD Terkait.

Penanggulangan Pasca Banjir memerlukan banyak tenaga dan biaya juga dukungan dari lembaga-lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah.

▪ Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat.

Masyarakat sebagai bagian dari yang terdampak langsung maupun sabagai Lembaga swadaya Masyarakat (LSM). Kebencanaan sangat berpengaruh apabila ikut andil dalam pelaksanaan

Penanggulangan bencana.

4. Ancaman (Threats)

- Masyarakat yang terdampak banjir.

Masyarakat yang terdampak banjir korban dari bencana pada saat bencana banyak yang acuh maksudnya acuh disini mereka hanya berpangku tangan menunggu dan mengharapkan bantuan dari pemerintah tanpa ikut berkontribusi, masyarakat sekarang cenderung memiliki harapan yang tinggi pada pemerintah untuk menyelesaikan segala urusan penanggulangan bencana.

- Lokasi Bencana.

Pada musin hujan, angin kencang sering terjadi banjir, pohon tumbang di beberapa titik lokasi bencana dalam hal ini harus memprioritaskan lokasi yang harus segera di tanggulangi lebih dahulu.

Kesimpulan dan Strategi

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanggulangan Pascabencana dengan menggunakan analisis SWOT. Hasilnya adalah dengan memanfaatkan pelatihan dari pemerintah, regulasi yang lengkap serta bantuan dari OPD terkait dan LSM. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dapat membuat program kerja yang baik dan mempercepat proses penanggulangan Pascabencana. Dengan analisis SWOT juga dapat strategi untuk mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada dengan cara mengklarifikasikan dampak bencana untuk di buat prioritas penanganan dan mengajak tokoh masyarakat agar penanggulangan pascabencana di beberapa titik lokasi dapat terselesaikan dengan baik.

1.5 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
A.	Perencanaan Kinerja								
1	Memformalkan dokumen rencana strategis sebelum di unggah pada website ers.menpan.go id.	Telah di perbaiki dokumen rencana strategis sebelum di unggah	1 Dokumen	B06	Kepala Badan	Selesai	Telah diupload		https://drive.google.com/file/d/1-EXTz3pmzL0xN9DFIOsziJV9Sd9b_31P/view?usp=drive_link
2	Mengutamakan penggunaan target kinerja sasaran yang berorientasi hasil (Outcome)	Telah diperbaiki target kinerja sasarnya berorientasi hasil (outcome)	100%	B06	Kepala Badan	Selesai	Sudah berorientasi pada hasil (outcome)		https://docs.google.com/spreadsheets/d/16gPuLRTKg-fZ9Fky67jxMG1ILcNU-zQrP8h3BTD0GgU/edit?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
3	Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Telah diperbaiki penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional	1 Dokumen	B05	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah diperbaiki	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5gvO9a2--O5thyEBYO1O1r4Plbo5dFeZ0CmS9o2g8/edit?usp=drive_link
4	Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melibatkan adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar organisasi dan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Telah dilakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja melibatkan adanya potensi <i>Crosscutting</i> kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar organisasi dan pihak-pihak lainnya	1 Dokumen	B06	Kepala Badan		Bahan sudah diperbaiki		https://drive.google.com/file/d/1vzqFPHZHUhy7Ucswx55LUBRUg_aKU7SG/iew?usp=drive_link
5	Melakukan pemantauan terhadap Rencana Aksi Kinerja secara berkala	Telah dilakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang setiap level organisasi	1 Dokumen	B01, B04, B07, B10, B11	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah tersusun	-	https://drive.google.com/file/d/1-g1cEtmB8G9LXToy4C9pTRCb2pcuMzCt/view?usp=drive_link
B	Pengukuran Kinerja								
1	Mencantumkan definisi operasional pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	Telah dicantumkan definisi operasional di dokumen IKU	1 Dokumen	B01, B05	Kepala Badan	Selesai	Bahan sudah dicantumkan		https://drive.google.com/file/d/13g5g4XWXI45hN_nWX574-iWInbPmgSxn/view?usp=drive_link
2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja	Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	1 Dokumen	B06	Kepala Badan	Selesai	Bahan sudah tersusun		https://drive.google.com/file/d/13g5g4XWXI45hN_nWX574-iWInbPmgSxn/view?usp=drive_link
3	Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala	1 Laporan	B01 - B12	Kepala Dinas	Selesai	Pemantauan capaian kinerja secara fisik dan keuangan		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rn3wh_oO85lmFSvW5NEdyQ8dY88V3oG1SiZPRf29IPs/edit?usp=drive_link
4	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja	1 Laporan	B03, B0	Kepala Badan	Selesai	Telah memberikan Peringatan pada ASN yang tidak disiplin.	-	https://drive.google.com/file/d/10t3sfykg_eW7lzcBllbRIPK_iJ_Ud4BkiW/view?usp=drive_link
5	Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id	Telah diunggah laporan kinerja dan data pendukung melalui esr.menpan.go.id	1 Aplikasi	B01, B04, B07, B10	Kepala Dinas	Selesai	Telah diupload	-	https://drive.google.com/file/d/1tJdJg3vDIQZCY4d6bVepZsvQB61CBEW/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
C	Pelaporan Kinerja								
	1 Menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	telah menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	1 laporan	B06	Kepala Badan	Selesai	Laporan Kinerja telah direviu dan diperbaiki	-	https://drive.google.com/file/d/1d2iz911bMFi7ttN45MrOCJoAntG0m4/view?usp=drive_link
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
	1 Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP	Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	2 laporan	B02	Kepala Badan	Selesai	LHE dan Surat Pernyataan Reviu	-	https://drive.google.com/file/d/1kVV-5uPMClNFeJfxFnQ7WIEdmAZXep/iew?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1jNRdw7w3JHLnItnn0avXEUolv2DjiiGh/view?usp=drive_link

Sumber: Tindak lanjut LHE dari Inspektorat Kota Padang Panjang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

1. Renstra

a) Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2025-2029

Visi dan misi Kota Padang Panjang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Padang Panjang yang termaktub dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu: **Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah**". Visi tersebut menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4: Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat dan Misi ke 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan, Tujuan Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan Daerah, implementasi nilai-nilai ideology Pancasila, karakter kebangsaan dan Pendidikan Politik dan Sasaran ke 1 Meningkatnya Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik, Sasaran ke 2 Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana serta Sasaran ke 3 Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kesbangpol pada tahun berjalan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pembangunan daerah, hasil evaluasi capaian kinerja, serta kebutuhan aktual dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik sosial. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan strategis dengan pelaksanaan

program dan kegiatan, sehingga tetap relevan dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait *response time* tanggap darurat, persentase konflik yang tertangani, serta cakupan wilayah dengan sistem penanggulangan bencana terpadu. Penyesuaian dilakukan terhadap target dan strategi pencapaian agar lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Selain itu, revisi Renstra juga mempertimbangkan adanya perubahan kebijakan, penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan, serta kebutuhan peningkatan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan bencana dan penanganan konflik. Dinamika kondisi daerah yang memerlukan respon cepat dan terkoordinasi menjadi dasar dalam memperkuat arah kebijakan dan strategi yang lebih adaptif.

Melalui revisi ini, diharapkan BPBD Kesbangpol mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam mempercepat *response time* tanggap darurat, meningkatkan persentase konflik yang tertangani secara komprehensif, serta memperluas cakupan wilayah yang memiliki sistem penanggulangan bencana terpadu. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, implemementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik		Indeks Harmoni	70	72	74	76	78	80	
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	
NSPK : - RPJMD: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum										
		Meningkatnya Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100	100	100	100	100	100	
NSPK : - RPJMD: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim										
		Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	64,15	64,25	64,45	64,75	64,95	65	

Sumber : Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2025-2029

b) Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2024-2026

Adapun yang menjadi tujuan dari BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum periode 2024–2026 adalah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi awal	Target Renstra BPBD, KESBANGPOL tahun ke		
						2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum		Persentase Penanganan Bencana yang tertangani sesuai SOP			100%	100%	100%
		Meningkatnya manajemen penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat		6 menit	5 menit	5 menit	5 menit
			Persentase gangguan konflik yang tertangani	Jumlah konflik yang tertangani/ jumlah konflik keseluruhan x 100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelesaian potensi konflik di Daerah	Angka Penyelesaian Konflik yang Tertangani			5 Kejadian	4 Kejadian	3 Kejadian

2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2025 BPBD Kesbangpol Padang Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan bangsa dan politik Padang Panjang Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025 berikut ini:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Persentase gangguan/konflik yang tertangani	100%	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100%
2	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Respon time Tanggap Darurat	5 menit	2	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana.	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	16 Kelurahan
				3	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	64,15

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.041.271.812	4.876.336.843
2	Penanggulangan Bencana	1.288.694.470	850.402.760
3	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711.022.000	711.840.750

4	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.816.083.966	2.308.064.716
5	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-
6	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	113.950.000	75.000.000
7	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	500.342.000	101.816.000
	Jumlah	9.471.364.248	8.923.461.069

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan (berdasarkan RPD/ Renstra 2024-2026)

A. Capaian Tujuan dan Sasaran

Format Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana	Respon time Tanggap Darurat	5 menit	5 menit	100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian potensi Konflik di Daerah	Persentase gangguan konflik yang tertangani	100%	100%	100 %

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang dua sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan realisasi 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun 2025, realisasi pencapaian indikator sasaran telah sesuai dengan target, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut

Sasaran 1 : Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana” dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Responstime Tanggap Darurat	5 menit	5 menit	5 menit	100%

Sumber: RPD Kota Padang Panjang 2024-2026

Response Time Tanggap Darurat adalah selang waktu (dalam menit atau jam) antara waktu laporan kejadian bencana diterima oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD dengan waktu tim penanganan darurat tiba di lokasi kejadian atau memulai tindakan penanganan darurat.

Tujuan Pengukuran Indikator ini digunakan untuk menilai:

1. Kecepatan respons BPBD dalam menangani kejadian bencana.
2. Efektivitas sistem peringatan dini dan koordinasi tanggap darurat.
3. Kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Rumus pengukuran indikator:

Response Time = Waktu Kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana – Waktu Laporan Diterima

Waktu Kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana saat persiapan peralatan sebelum kelokasi kejadian pukul 08.00 WIB, sedangkan waktu laporan di terima 07.55 WIB, maka selisih waktu tersebut merupakan responstime (07.55 WIB – 08.00 WIB = 5 menit)

Semakin kecil nilai response time, maka kinerja tanggap darurat semakin baik. Response time yang cepat menunjukkan kesiapsiagaan sistem penanggulangan bencana yang efektif.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan program penanggulangan bencana yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp.896.737.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 854.931.922,-

Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelesaian potensi Konflik di Daerah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelesaian potensi Konflik di Daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase gangguan konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%

Sumber: RPD Kota Padang Panjang 2024-2026

Rumus Perhitungan Indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah Total Konflik yang terjadi}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Konflik yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut.
- Total Konflik yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut.
- Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelesaian potensi Konflik di Daerah” dengan capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%.

Dalam hal ini tidak adanya konflik yang terjadi, maka akan terwujud daerah yang kondusif dan meningkatnya kerukunan warga masyarakat di Kota Padang Panjang. Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah.

Untuk realisasi tahun 2025 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase gangguan konflik yang tertangani” dengan target sebesar 100% dengan capaian realisasi 100%. Faktor penguat dari pencapaian ini adalah Peningkatan pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila serta kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan formal, non formal, dan berbasis komunitas melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah, Optimalisasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial sebagai mediator serta penggerak nilai persatuan dan toleransi melalui FKUB serta

Penguatan mekanisme deteksi dini, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas aparatur dalam penanganan konflik sosial dan politik.

Pengukuran realisasi 100% dapat dilaksanakan disebabkan

- Terselenggaranya kegiatan sosialisasi/edukasi Pancasila dan pendidikan politik kepada masyarakat
- Tersedianya modul, materi, atau media edukasi nilai Pancasila dan kebangsaan
- Meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
- Terbentuknya forum dialog atau musyawarah masyarakat
- Meningkatnya kapasitas tokoh masyarakat/agama sebagai mediator konflik
- Terselenggaranya kegiatan dialog kebangsaan dan kerukunan social
- Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penanganan konflik

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik dilaksanakan melalui 4 (empat) program, 4 (empat) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp. **3.196.721.466,-** dengan realisasi sebesar Rp. 2.879.772.866,-

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3. 2
Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang berdasarkan Restra 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Respon time Tanggap Darurat	6 menit	6 menit	100%	5 menit	5 menit	100%	-	-	-
2	Persentase gangguan/konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Sumber: Restra BPBD Kesbangpol 2018-2023, Restra BPBD Kesbangpol Tahun 2024-2026

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian dari indikator kinerja yaitu pada “Indikator Kinerja Resptime Tanggap Darurat” dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik (Lebih kecil menitnya lebih baik) seperti pada tahun 2024 target 5 menit, realisasi 5 menit dengan capaian kinerja 100%. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi masih cukup tinggi. Sedangkan Tahun 2025 Indikator Kinerja Sasaran yaitu Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu dengan target 16 Kelurahan, realisasi 16 Kelurahan dengan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja Sasaran yang kedua yaitu Persentase gangguan/konflik yang tertangani, Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Berkurangnya angka kejadian konflik sosial di masyarakat tahun 2025 dalam hal ini makin kecil angka konflik makin bagus karena menurunnya konflik sosial di Kota Padang Panjang.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya

**Tabel 3. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra Berdasarkan Renstra 2024-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
1	Meningkatnya manajemen penanganan bencana	Resptime Tanggap Darurat	5 menit	5 menit
2	Meningkatnya Penyelesaian potensi konflik di Daerah	Persentase gangguan konflik yang tertangani	100%	100%

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, untuk tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Konflik Tertangani” dengan realisasi 100%. Indikator dari sasaran I (satu) capaian 100 % semua konflik yang terjadi dikota Padang Panjang tertangani/aman. Indikator dari sasaran II (dua) yaitu Cakupan Wilayah dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu dengan 16 Kelurahan, dengan realisasi 100% atau persentase capaian 100%. Sedangkan Indikator dari sasaran III (tiga) yaitu Nilai AKIP BPBD Kesbangpol dengan Target awal Renstra 64,15. Dari ketiga tabel ini dapat disimpulkan bahwa BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang telah di tetapkan Rencana Strategis BPBD, Kesbangpol Tahun 2025-2029.

3.1.2. Capaian Kinerja Organisasi setelah perubahan (berdasarkan RPJMD/ Renstra 2025-2029)

Pengukuran capaian kinerja BPBD Kesbangpol dilakukan melalui 2 (dua) dokumen perencanaan yang memuat sasaran strategis yaitu Renstra Tahun 2024-2026 yang menyesuaikan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yang menyesuaikan dokumen RPJMD 2025-2029. Capaian kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen RPD 2024-2026 sudah diuraikan secara rinci pada subbab sebelumnya. Pada dokumen perencanaan strategis BPBD Kesbangpol Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, implemementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik”, dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2025 dengan diukur capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 4
Capaian Kinerja Sasaran BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100 %
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	64,15	66,90	104 %

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang dua sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan realisasi 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tahun 2025, realisasi pencapaian indikator sasaran telah sesuai dengan target, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, dan Pendidikan Politik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, dan Pendidikan Politik” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100%	100%	100%

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol 2025-2029

Rumus Perhitungan Indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah Total Konflik yang terjadi}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Konflik yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut.
- Total Konflik yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut.
- Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik” dengan capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%.

Dalam hal ini tidak adanya konflik yang terjadi, maka akan terwujud daerah yang kondusif dan meningkatnya kerukunan warga masyarakat di Kota Padang Panjang. Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah.

Untuk realisasi tahun 2025 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Konflik Tertangani” dengan target sebesar 100% dengan capaian realisasi 100%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini adalah Peningkatan pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila serta kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan formal, non formal, dan berbasis komunitas melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah, Optimalisasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial sebagai mediator serta penggerak nilai persatuan dan toleransi melalui FKUB serta Penguatan mekanisme deteksi dini, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas aparatur dalam penanganan konflik sosial dan politik.

Pengukuran realisasi 100% dapat dilaksanakan disebabkan

- Terselenggaranya kegiatan sosialisasi/edukasi Pancasila dan pendidikan politik kepada masyarakat
- Tersedianya modul, materi, atau media edukasi nilai Pancasila dan kebangsaan
- Meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
- Terbentuknya forum dialog atau musyawarah masyarakat
- Meningkatnya kapasitas tokoh masyarakat/agama sebagai mediator konflik
- Terselenggaranya kegiatan dialog kebangsaan dan kerukunan social
- Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penanganan konflik

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik dilaksanakan melalui 4 (empat) program, 4 (empat) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp. **3.196.721.466,-** dengan realisasi sebesar Rp. 2.879.772.866,-

Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana

Hasil pengukuran capaian kinerja “Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100%

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol 2025-2029

Berdasarkan data tabel diatas hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu, Target tahun 2025 sebanyak 16 Kelurahan dengan realisasi sebanyak 16 Kelurahan.

Cakupan wilayah dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu (SPBT) adalah persentase wilayah administrasi (desa/kelurahan/kecamatan) yang telah memiliki dan menerapkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu, meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, kesiapsiagaan, mitigasi, respons darurat, dan pemulihan.

Rumus Pengukuran:

$$\text{Cakupan Wilayah SPBT} = \frac{\text{Jumlah wilayah yang memiliki SPBT}}{\text{Jumlah seluruh wilayah}} \times 100 \%$$

Indikator ini diukur berdasarkan persentase wilayah administrasi yang telah memiliki dan menerapkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu. Semakin luas cakupan wilayah yang memiliki sistem tersebut, maka semakin tinggi kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana serta mempercepat respons dan pemulihan apabila terjadi bencana.

Peningkatan cakupan wilayah dengan sistem penanggulangan bencana terpadu juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana serta mendukung terciptanya masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah dan wilayah.
2. Ketersediaan dokumen perencanaan kebencanaan seperti rencana kontinjensi dan rencana penanggulangan bencana.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan.
4. Dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.
5. Koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan dari instansi vertikal dan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dengan 4 (empat) Kegiatan dan 5 (lima) Sub kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp. **896.737.760,-** dengan realisasi sebesar Rp. 854.931.922,-

Sasaran 3: Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	66,90	64,15	66.90	104%

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol 2025-2029

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BPBD–

Kesbangpol. Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Semakin tinggi nilai AKIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerja secara efektif, transparan, dan akuntabel, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaporan capaian kinerja. Nilai AKIP juga menggambarkan tingkat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan meningkatnya nilai AKIP, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di BPBD–Kesbangpol semakin baik, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Untuk mendukung caaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 4.876.335.843,- dan realisasi sebesar Rp. 4.491.621.106,- atau 93,2%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Konflik Tertangani	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	-	-	-	-	-	-	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100 %
3	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	-	-	-	-	-	-	64,15	66,90	104%

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2025-2029

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian dari indikator kinerja yaitu pada “Persentase Konflik Tertangani” dari tahun ke tahun dengan capaian kinerja 100%. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi masih cukup tinggi. Indikator Kinerja Sasaran yang Persentase gangguan/konflik yang tertangani, Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Berkurangnya angka kejadian konflik sosial di masyarakat tahun 2025 dalam hal ini makin kecil angka konflik makin bagus karena menurunnya konflik sosial di Kota Padang Panjang.

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu dengan target 16 Kelurahan, realisasi 16 Kelurahan dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan Nilai AKIP BPBD Kesbangpol untuk Target tahun 2025, Targetnya adalah 64,15 realisasi 66,90.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Periode akhir Renstra)

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)
1	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100%	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penagulangan Bencana Terpadu	16 Kelurahan	16 Kelurahan
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	66,90	75,77

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, untuk tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Konflik Tertangani” dengan realisasi 100%. Indikator dari sasaran I (satu) capaian 100 % semua konflik yang terjadi dikota Padang Panjang tertangani/aman. Indikator dari sasaran II (dua) yaitu Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu dengan 16 Kelurahan, dengan realisasi 100% atau persentase capaian 100%. Sedangkan Indikator dari sasaran III (tiga) yaitu Nilai AKIP BPBD Kesbangpol dengan Target awal Renstra 64,15. Dari ketiga tabel ini dapat disimpulkan bahwa BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang telah di tetapkan Rencana Strategis BPBD, Kesbangpol Tahun 2025-2029.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

a. Faktor Internal

1. Efektivitas program sosialisasi
 - Materi Pancasila dan pendidikan politik disampaikan secara kontekstual dan mudah dipahami.
 - Metode partisipatif (dialog publik, diskusi warga, sekolah politik) meningkatkan daya serap masyarakat.
2. Sinergi antar pemangku kepentingan
 - Kolaborasi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.
 - Aparat kewilayahan (desa/kelurahan) aktif dalam deteksi dini konflik.
3. Peningkatan kapasitas aparatur
 - Petugas mediasi dan fasilitator konflik memiliki kompetensi komunikasi dan resolusi konflik.
 - Respons cepat terhadap potensi konflik sosial dan politik.
4. Penguatan kebijakan dan perencanaan kebencanaan
 - Tersusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi pada sebagian besar wilayah rawan bencana.
 - Integrasi aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan
 - Peran aktif BPBD dan perangkat daerah terkait dalam koordinasi penanggulangan bencana.
 - Terbentuknya tim atau forum penanggulangan bencana lintas sektor.
6. Peningkatan kapasitas masyarakat
 - Pelaksanaan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan kebencanaan kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.
 - Terbentuknya kelompok siaga bencana di tingkat kelurahan/desa.
7. Dukungan sarana dan prasarana
 - Tersedianya sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di sebagian wilayah.
 - Meningkatnya ketersediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

b. Faktor Eksternal

1. Stabilitas sosial dan politik
 - Kondisi ekonomi dan keamanan yang relatif stabil mendukung penurunan konflik.
2. Partisipasi masyarakat
 - Masyarakat lebih terbuka terhadap dialog dan musyawarah.
 - Tingkat toleransi dan kesadaran kebangsaan meningkat.
3. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi
 - Bantuan teknis dan pendanaan dari BNPB/BPBD Provinsi.
4. Partisipasi dan kesadaran masyarakat
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

a. Faktor Internal

1. Sosialisasi kurang tepat sasaran
 - Materi bersifat normatif dan tidak menyentuh persoalan nyata masyarakat.
 - Minim inovasi media dan pendekatan (terlalu formal, satu arah).
2. Keterbatasan sumber daya
 - Anggaran, SDM, dan waktu pelaksanaan terbatas.
 - Kurangnya tenaga mediator konflik yang kompeten.
3. Koordinasi lemah
 - Tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
 - Tidak adanya sistem pelaporan dan pemantauan konflik yang terpadu.
4. Belum meratanya sistem penanggulangan bencana terpadu
 - Tidak semua wilayah memiliki dokumen rencana kebencanaan, sistem peringatan dini, dan mekanisme evakuasi.
5. Keterbatasan sumber daya
 - Terbatasnya anggaran, SDM kebencanaan, dan peralatan penanggulangan bencana.
6. Koordinasi lintas sektor belum optimal
 - Masih terdapat tumpang tindih tugas antar perangkat daerah.
 - Mekanisme komando dan komunikasi saat bencana belum sepenuhnya efektif.
7. Monitoring dan evaluasi belum berkelanjutan
 - Sistem penilaian kesiapsiagaan wilayah belum dilaksanakan secara rutin.

b. Faktor Eksternal

1. Meningkatnya dinamika sosial-politik
 - Polarisasi politik, isu SARA, dan hoaks di media sosial.
2. Rendahnya literasi politik
 - Masyarakat mudah terprovokasi dan tidak memahami mekanisme penyelesaian konflik.
3. Tekanan ekonomi dan sosial
 - Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan memperbesar potensi konflik.
4. Karakteristik wilayah rawan bencana
 - Kondisi geografis dan topografis yang kompleks menyulitkan pengembangan sistem terpadu.
5. Perubahan iklim
 - Intensitas dan frekuensi bencana yang meningkat di luar perencanaan awal.
6. Partisipasi masyarakat belum merata
 - Sebagian masyarakat belum terlibat aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Perbaikan Strategi Sosialisasi
 - Menyusun ulang materi sosialisasi Pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan politik agar kontekstual dengan permasalahan lokal.
 - Memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana edukasi politik dan kebangsaan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Fasilitator
 - Melaksanakan pelatihan resolusi konflik, mediasi sosial, dan komunikasi publik bagi aparatur terkait.
 - Membentuk dan memperkuat tim fasilitator/mediator konflik di tingkat daerah dan desa/kelurahan.
3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor
 - Membangun mekanisme koordinasi rutin dengan unsur TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
 - Menyusun SOP penanganan konflik sosial dan politik secara terpadu.
4. Peningkatan Sistem Deteksi Dini dan Monitoring Konflik
 - Mengembangkan sistem pelaporan potensi konflik berbasis wilayah Data konflik yang akurat dan terbaru.
 - Mengoptimalkan peran aparat kewilayahan dalam pemantauan isu sosial dan politik.

5. Peningkatan Literasi Politik dan Ketahanan Masyarakat
 - Melaksanakan pendidikan politik berkelanjutan bagi kelompok rentan konflik (pemuda, komunitas adat, kelompok masyarakat tertentu).
 - Menggalakkan kampanye anti-hoaks dan penguatan nilai toleransi.
6. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
 - Penyusunan dan/atau revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana Terpadu.
 - Pembentukan dan penguatan forum koordinasi lintas sektor (BPBD, OPD terkait, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat).
7. Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu
 - Penyusunan peta risiko bencana terintegrasi berbasis SIG.
 - Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) yang terhubung antarwilayah.
 - Integrasi data kebencanaan antar OPD dan desa/kelurahan.
8. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
 - Pelatihan manajemen risiko bencana dan respons darurat bagi aparatur daerah.
 - Simulasi penanggulangan bencana terpadu lintas OPD secara berkala.
 - Penyusunan dan uji coba rencana kontinjensi bencana.
9. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - Pembentukan dan penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
 - Edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat (sekolah, komunitas, dan kelompok rentan).
 - Pelaksanaan simulasi evakuasi dan tanggap darurat berbasis komunitas.
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung seperti sarana evakuasi, logistic dan peralatan kebencanaan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi kebencanaan
11. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Secara umum, pencapaian pernyataan kinerja dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terdapat program/kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan, namun juga terdapat beberapa yang belum optimal sehingga berdampak pada belum tercapainya target secara maksimal.

A. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan seperti peningkatan kapasitas SDM, simulasi kebencanaan, serta penguatan sistem peringatan dini terbukti mampu meningkatkan *response time* tanggap darurat dan cakupan wilayah dengan sistem penanggulangan bencana terpadu.

2. Program Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sosialisasi wawasan kebangsaan, deteksi dini konflik, dan fasilitasi penyelesaian konflik secara terpadu berkontribusi terhadap meningkatnya persentase konflik yang tertangani.

3. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat)

Penguatan perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi mendukung peningkatan nilai AKIP dan kualitas pelaporan kinerja.

Faktor keberhasilan utama:

- Koordinasi lintas OPD yang efektif
- Ketersediaan anggaran yang memadai
- Dukungan kebijakan pimpinan
- Partisipasi aktif masyarakat

B. Program/Kegiatan yang Mengalami Kendala/Kegagalan

1. Kegiatan yang bergantung pada lintas sektor

Beberapa kegiatan belum optimal karena koordinasi antar instansi belum berjalan maksimal, terutama dalam integrasi data dan respon cepat di lapangan.

2. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana

Keterbatasan anggaran menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan kebencanaan dan fasilitas pendukung secara menyeluruh.

3. Kegiatan edukasi dan sosialisasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah di beberapa wilayah berdampak pada belum meratanya pemahaman dan kesiapsiagaan bencana.

Faktor penyebab kendala:

- Keterbatasan SDM dan kompetensi teknis
- Keterbatasan anggaran dan prioritas program
- Belum optimalnya integrasi sistem informasi
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

7. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Komposisi dan Kualifikasi SDM: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 26 ASN, 7 P3K dan 22 THL. Sebaran Golongan : Mayoritas ASN Golongan III (25%), sedangkan Tingkat pendidikan 33% pegawai memiliki gelar sarjana 20% (S1), 13% (S2), 5% (D3) dan SLTA/SLTP 62%.

1) Efisiensi dan permasalahan SDM

Keunggulan : Struktur organisasi belum lengkap dengan pembagian tugas sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.

Kelemahannya:

- Ketidakseimbangan antara jumlah ASN yang berpendidikan sesuai dengan tupoksinya;
- Keterbatasan ASN yang sesuai dengan pendidikan/ahli di bidangnya akan menurunkan kualitas;
- Minimnya program pelatihan dan peningkatan kompetensi berdampak kepada kinerja.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi SDM

- Meningkatkan jumlah ASN yang berpendidikan S1 yang kompetensi di bidang yang di butuhkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mendorong pelatihan berkelanjutan di bidang Penanggulangan Bencana;
- Mengoptimalkan tugas yang diberikan, agar pembagian beban kerja lebih merata.

2) Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Alokasi dan realisasi Anggaran

- Total Anggaran Rp. 8.9 miliar,- dengan realisasi 91.7%

Distribusi Anggaran :

- Rp. 4.4 milyar (50%) untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Rp. 854 juta untuk Program Penanggulangan Bencana;
- Rp. 699 juta untuk Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- Rp. 2 milyar untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- Rp. 74 juta Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
- Rp. 101 juta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Efisiensi dan Permasalahan Anggaran

- Keunggulan :
 - Realisasi anggaran mencapai 98.75% menunjukkan efisiensi dalam perencanaan dan penggunaan Anggaran;
 - Kegiatan Perioritas Penanggulangan bencana, Paskibra, Dana Hibah.

- Kelemahan :
- Porsi Anggaran Penanggulangan bencana 1.4 milyar;
- Porsi Anggaran untuk Dana hibah ke Instansi Vertikal lebih banyak.

Rekomendasi untuk meningkatkan Efisiensi Anggaran

- Strategi Perbaikan:
- Mendorong peningkatan alokasi anggaran penanggulangan Bencana untuk pelatihan dan penambahan sarana prasarana kebencanaan.

Kondisi Sarana Prasarana

- Beberapa Fasilitas untuk penanggulangan bencana belum optimal;
- Fasilitas perangkat electronic: Laptop, PC Printer, dan peralatan kerja lainnya.

3) Efisiensi dan permasalahan Sarana Prasarana

Keunggulan

- Pemeliharaan Kendaraan dinas berjalan dengan baik dengan realisasi 88.47%;
- Kebutuhan Dasar Operasional masih terpenuhi.

Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sarana dan prasarana

- Mengusulkan pengadaan peralatan kantor yang memadai supaya kerja lebih maksimal lagi;
- Dan mengalokasikan dana pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Kesimpulan :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten;
- Sumber Dana yang mencukupi;
- Sarana dan Prasarana yang memadai.

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakeimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
---	---	---	---

Tabel 3. 7

Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan Politik Kota Padang Panjang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BPBD, Kesbangpol			100%	100%	100%		
			1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	4.876.335.843	4.491.561.106	92%		
			a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	4.248.677.921	3.958.768.023	93%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	37 orang	31 orang	84%	Kurangnya realisasi terjadi karena ada beberapa orang ASN yang pensiun dan mutasi	anggaran selanjutnya akan dikurangi sesuai kebutuhan.
				Jumlah Dana	4.248.677.921	3.958.768.023	93%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	155.262.650	153.059.631	99%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	100%		
				Jumlah Dana	5.822.400	5.554.000	95%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%		
				Jumlah Dana	19.495.050	18.504.200	95%		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%		
				Jumlah Dana	12.783.200	12.155.400	95%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 paket	12 paket	100%		
				Jumlah Dana	117.162.000	116.846.031	100%		
			c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	131.310.072	119.200.250	91%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 paket	12 paket	100%		
				Jumlah Dana	1.747.200	1.740.000	100%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	100%	Sesuai Kebutuhan	Penganggaran selanjutnya akan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									disesuaikan berdasarkan kebutuhan
				Jumlah Dana	27.194.872	20.228.500	74%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%		
				Jumlah Dana	102.368.000	97.231.750	95%		
			d Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	100%	100%		
					341.085.200	260.533.202	76%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	20 unit	20 unit	100%	Tidak terealisasinya gaji sopir yang masuk dalam anggaran, karena kebijakan sopir dirumahkan	anggaran selanjutnya akan dikurangi sesuai kebutuhan.
				Jumlah Dana	300.096.000	236.654.202	79%	Realisasi rendah karena terjadi penarikan aset oleh BPKD	anggaran selanjutnya akan dikurangi sesuai kebutuhan.
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	20 unit	16 unit	100%		
				Jumlah Dana	35.590.000	18.717.000	53%	Anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan	Standar biaya agar disesuaikan mengikuti harga pasar.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								untuk pemeliharaan komputer, laptop, genset, dan mesin sinsaw yang rusak. Serta SB lebih tinggi harga pasar.	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%		
				Jumlah Dana	5.399.200	5.162.000	96%		
			2 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	711.840.750	699.349.850	98%		
			a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pencegahan Terhadap Peristiwa Gangguan Keamanan Berlatar Belakang Ideologi Radikal Dan Isu-Isu Di Daerah	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	711.840.750	699.349.850	98%		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	80 orang	80 orang	100%		
				Jumlah Dana	711.840.750	699.349.850	98%		
			3 PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Pendidikan Politik	100%	100%	100%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pada Kader Partai Politik					
				Jumlah Dana	2.308.064.716	2.004.621.602	87%		
			a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pencegahan Terhadap Perkembangan Politik Di Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Etika Dan Budaya	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	2.308.064.716	2.004.621.602	87%		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	45 orang/ 3 hibah	45 orang/ 3 hibah	100%		
				Jumlah Dana	796.294.916	792.815.216	100%		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	15 orang/ 5 hibah	15 orang/ 5 hibah	100%	tidak terealisasinya honor	menyesuaikan penanggaran selanjutnya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah				Forkopimda	
				Jumlah Dana	1.511.769.800	1.211.806.386	80%		
			4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	75.000.000	74.193.000	99%		
			a Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	75.000.000	74.193.000	99%		
			Terlaksananya Pencegahan Potensi Konflik Akibat Gejala Ekonomi, Masalah Sosial Dan Budaya Dikalangan Masyarakat	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Akibat Gejala Ekonomi, Masalah Sosial Dan Budaya Dikalangan Masyarakat	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	75.000.000	74.193.000	99%		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	43 orang	43 orang	100%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kepercayaan di Daerah	Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah					
				Jumlah Dana	75.000.000	74.193.000	99%		
			5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	101.816.000	101.608.014	100%		
			a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Konflik Yang Berkembang Ditengah Masyarakat	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	101.816.000	101.608.014	100%		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	101.816.000	101.608.014	100%		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
			6 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	896.737.760	854.931.922	95%		
			a Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	35.669.000	27.086.000	76%		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1 (Satu) Tahun	160 orang	160 orang		honor Narasumber tidak terealisasi karena tidak adanya kegiatan Bimtek dan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan setelah perubahan anggaran. Kegiatan KIE dilakukan melalui pemasangan stiker informasi	menyesuaikan penanggaran selanjutnya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								bencana	
				Jumlah Dana	35.669.000	27.086.000	76%		
			b Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kesiapan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana	100%	100%	100%		
					769.887.600	760.723.050	99%		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Dengan Maklumat Pelayanan Yang Sah Dan Legal Sesuai Dengan Jenis Ancaman Bencana Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya	12 Dokumen/ laporan	12 Dokumen/ laporan	100%		
				Jumlah Dana	769.887.600	760.723.050	99%		
			c Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%		
					68.340.000	46.074.180	67%		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat Bencana Dan Skpdb Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Anggaran sudah sesuai kebutuhan	menyesuaikan penanganannya selanjutnya
				Jumlah Dana	68.340.000	46.074.180	67%		
			d Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	22.841.160	21.048.692	92%		
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana Di Semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rp.	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Fisik Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(R3p) Kabupaten/Kota Yang Dilegalkan					
				Jumlah Dana	22.841.160	21.048.692	92%		

Sumber: Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2025-2029

3.2. Realisasi Anggaran-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai Penujang Urusan Pemerintahan mendapat alokasi anggaran di tahun 2025 sesuai sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan mendapat alokasi anggaran di tahun 2025 sesuai **APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 8.969.795.069,-** sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan **Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.226.325.894,- atau 91.7%**. Tahun anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik Kota Padang Panjang melaksanaka 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Total Dana sebesar Rp. 4.876.335.843,- dengan Realisasi sebesar Rp. 4.491.621.106 atau (93,2%), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 4.248.677.921,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.958.768.023,- (93.2%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 1 (satu) tahun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik Kota Padang Panjang.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp. 5.822.400,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.554.000,- (95,4%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik untuk kebutuhan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2025.

2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp. 19.495.050,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.504.200,- (94,9%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, dan terbayarnya retribusi sampah selama 12 bulan pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2025.

3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 12.783.200,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.155.400,- (95,09%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetakan, jilid, dan fotocopy pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2025.

4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 117.162.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi penyelenggaraan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi SKPD guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 116.846.031,- (99,73%) Hasil kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat kantor pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2024 serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 1.747.200,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2025 urusan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.740.000,- (99,6%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat berupa materai Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan Politik 2025.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 27.194.872,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan pemerintah daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.288.500,- (74,6%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air dan listrik kantor selama 12 bulan pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2025.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp. 102.368.000,- kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 97.231.750,- (95%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran gaji/honor/upah bagi Pegawai Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kantor pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2025.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 300.096.000,-kegiatan ini bertujuan terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional agar kendaraan selalu dalam keadaan optimal. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.236.654.202,- (78,86%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan bangsa dan Politik 2024.
- 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp.35.590.000,- kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan dari peralatan tersebut. Realisasi fisik dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik 2025 kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 18.717.000,- (53%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, cctv, kamera, meja, kursi, lemari serta peralatan penanggulangan bencana.

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp.5.399.200,- kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia bangunan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 5.162.000,- (96%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan angsa dan Politik 2025

2. Program Penanggulangan Bencana di dukung kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian resiko Bencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana Rp. 35.669.000,- kegiatan ini berupa pemeliharaan rambu-rambu evakuasi bencana dan pencetakan stiker informasi edukasi bencana yang dipasang ke rumah warga. Realisasi keuangan sebesar Rp.27.086.000 (75,94%). Hasil kegiatan ini.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan terhadap Bancana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 769.887.600,- Kegiatan ini ditujukan untuk merekrut personil pengisian Struktur Pusdalops BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025, dalam upaya peningkatan pelayanan informasi dan administrasi kesiapsiagaan bencana. Realisasi keuangan sebesar Rp. 760.723.050,- (98,81%). realisasi Fisik Sub kegiatan ini 100% Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan terhadap Bancana, kegiatan ini telah di bayarkan upah Tanaga Harian lepas anggota pusdalops, alat kebencanaan dan Perjalanan Dinas Biasa di bayar untuk perjalanan dalam Provinsi.
 - 2) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 22.481.160,-. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu Kejadian Pascabencana yang berdampak yang berskala kecil di Kota Padang Panjang Tahun 2025 berupa bahan bangunan, Makan Minum kegiatan, dan Biaya Perjalanan Dinas dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.048.692,- (92,15%). Realisasi fisik kegiatan 100%.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana Rp.68.340.000,-. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional Tim Reaksi Cepat dalam situasi tanggap darurat. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.074.180 (67,42%). Dengan realisasi fisik 100% Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung operasional Tim TRC dalam situasi tanggap darurat berupa bencana lonsor, banjir, pohon tumbang, kebakaran dan lainnya seperti penyediaan makan dan minum dan biaya perjalanan dinas untuk Tim TRC.

3. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan dengan jumlah dana Rp. 711.840.750,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 699.349.850,- (98.2%), sedangkan realisasi fisik 100% Kegiatan ini untuk Biaya Paskibra dari seleksi sampai dengan upacara hari besar Nasional Tahun 2025,

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan jumlah dana Rp. 796.294.916,-. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 792.815.216,- (99.6%), Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2025,
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk Hibah kepada kepada Instansi Vertikal. Belanja Hibah Barang Kepada Kejaksaan Negeri dan Belanja Hibah Barang kepada Secata B dan Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, pembawa acara dan panitia untuk memfasilitasi forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah, dari kegiatan ini Narasumber adalah Unsur Pimpinan Daerah, Forkopimda (Walikota, Wakil Walikota, Kejaksaan, Dandim, Pengadilan Negeri, Kapolres, Ka Brimob) kegiatan dilakukan untuk menyelesaikan Konflik yang ada di masyarakat, sehingga pertemuan tidak rutin di laksanakan (Insidental). dengan adanya isu-isu sara dan isu seputar IPOLEKSOSBUDHANKAM serta isu-isu lainnya yang dapat mengancam Stabilitas Daerah dengan jumlah dana Rp. 1.511.769.800,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.211.806.386,- (80.2%). realisasi fisik 100%

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah dengan jumlah dana Rp. 75.000.000,- Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.193.400,- (99%), Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya Kerukunan antar Umat Beragama di Kota Padang Panjang dan terciptanya situasi yang kondusif antar pemeluk agama di Kota Padang Panjang. dan di bayar makan dan minum rapat, honorarium Tim FKUB dan Honorarium Tim P4GN, Belanja Pakaian 2025. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk telah terciptanya stabilitas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025. realisasi fisik sub kegiatan 100%.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial dengan jumlah dana Rp. 101.816.000,- Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.608.014,- (99.8%). Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang dan sekitarnya, Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah, Honorarium Tim Pengawasan Orang Asing, Honorarium Kawaspadaan Dini, Honorarium Pakem, dan Honor Penangana Konflik Sosial. Dari kegiatan ini telah terciptanya stabilitas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan dengan adanya rapat-rapat tentang penanganan konflik sosial selama tahun 2025 Kota Padang Panjang relatif aman dan jauh dari kerusuhan dan konflik horizontal antar masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya stabilitas Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 realisasi fisik sub kegiatan ini 100%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengelolaan kinerja secara terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun pelaporan, secara umum sasaran strategis BPBD dan Kesbangpol Kota Padang Panjang telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator **persentase konflik tertangani** yang mencapai target 100 persen dengan realisasi 100 persen serta indikator **cakupan wilayah dengan sistem penanggulangan bencana terpadu** yang telah terealisasi pada seluruh 16 kelurahan dengan capaian 100 persen. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sinergi yang baik antara perangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang.

1. Permasalahan dan Kendala Utama

Meskipun capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja ke depan, antara lain:

1. Dinamika sosial masyarakat yang berpotensi memunculkan konflik sosial sehingga memerlukan penguatan sistem deteksi dini dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.
2. Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan konflik sosial dan penanggulangan bencana.
3. Tingkat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik dan risiko bencana yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
4. Kebutuhan peningkatan integrasi data, sistem informasi, dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung sistem penanggulangan bencana terpadu.

2. Strategi Pemecahan Masalah dan Rekomendasi ke Depan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan memperkuat implementasi SAKIP pada periode mendatang, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial melalui peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan secara berkelanjutan bagi aparatur dan relawan kebencanaan.

3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kebangsaan, dan peningkatan literasi kebencanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
4. Memperkuat sistem penanggulangan bencana terpadu melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem peringatan dini.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja sehingga lebih berorientasi pada hasil (outcome).
6. Mengoptimalkan penerapan manajemen kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai SAKIP dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, BPBD dan Kesbangpol Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendukung terwujudnya stabilitas sosial dan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana secara berkelanjutan.

Padang Panjang, 18 Februari 2026

Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Padang Panjang



Dian Eka Purnama, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I, IV/b, NIP. 19760725 200312 1 003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, dan Pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	16 Kelurahan
3	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	64,15


	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.613.765.656	
2	Penanggulangan Bencana	691.850.750	
3	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	695.151.550	
4	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Poltik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.172.559.916	
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	51.860.000	
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	109.902.000	
		8.335.089.872	-

Padang Panjang, Januari 2026

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA
Pih KEPALA BPBD, KESBANGPOL
KOTA PADANG PANJANG



DIAN EKA PURNAMA, SE, M.Si
NIP. 19760725 200312 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Persentase gangguan/konflik yang tertangani	100%	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100%
2	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Responstime Tanggap Darurat	5 menit	2	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana.	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	16 Kelurahan
				3	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	64,15

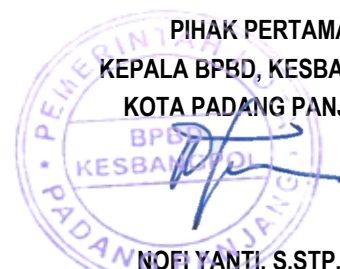
No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.041.271.812	4.876.336.843
2	Penanggulangan Bencana	1.288.694.470	850.402.760
3	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711.022.000	711.840.750
4	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.816.083.966	2.308.064.716
5	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-
6	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	113.950.000	75.000.000
7	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	500.342.000	101.816.000
	Jumlah	9.471.364.248	8.923.461.069

Padang Panjang, 1 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA
KEPALA BPBD, KESBANGPOL
KOTA PADANG PANJANG



NOFI YANTI, S.STP, MM
NIP. 19760924 199511 2 001

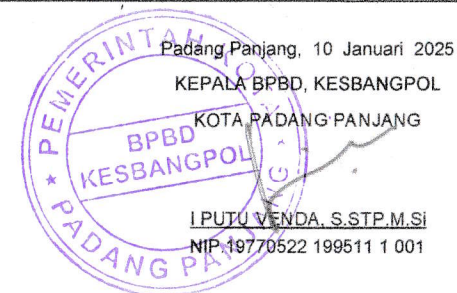
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Cakupan Wilayah dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	Kelurahan	Bencana yang tertangani ketika sudah kembali ke kondisi normal		$\frac{\text{Jumlah Bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100 \%$	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	Data BPBD	Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik
				Kelurahan yang telah diberikan pelatihan dan kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana		$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Kelurahan se Kota Padang Panjang}} \times 100 \%$		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
				Kelurahan yang telah diberikan pelatihan dan kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana		$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Kelurahan se Kota Padang Panjang}} \times 100 \%$		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
				Sekolah yang di berikan Sosialisasi/Simulasi dan telah dilakukan pembinaan berkelanjutan dan terbentuknya Satgas Bencana di Sekolah		$\frac{\text{Jumlah Sekolah Tk SLTATangguh Bencana}}{\text{Jumlah Sekolah Tk SLTA se Kota Padang Panjang}} \times 100 \%$		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
				Penyelamatan/pencegahan Non Kebakaran adalah Informasi, petunjuk, peringatan dan larangan kepada masyarakat tentang resiko bencana di dalam kawasan rawan bencana		cukup jelas		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
2	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	%	Pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia dan kecintaan terhadap negara, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara		$\frac{\text{Jumlah Siswa SLTA yang mengikuti Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Karakter}}{\text{Jumlah Siswa SLTA}} \times 100 \%$	Kesbangpol	Data BPBD	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pendidikan Bantuan Keuangan Parpol dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan bantuan keuangan Parpol		$\frac{\text{Jumlah Bantuan untuk Parpol}}{\text{Jumlah Parpol}} \times 100\%$		Data BPBD	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
				ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi.		$\frac{\text{Jumlah pembinaan kepada ormas}}{\text{Jumlah ormas yang terdaftar}} \times 100\%$		Data BPBD	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Padang Panjang, 10 Januari 2025
 KEPALA BPBD, KESBANGPOL
 KOTA PADANG PANJANG

I PUTU VENDA, S.STP.M.Si
 NIP. 19770522 199511 001



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL
TRIWULAN I TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi				Realisasi s/d triwulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi	Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Anggaran	Triwulan I 2025	%	Ket		
				I	II	III	IV							Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18		
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum	Respon time Tanggap Darurat	5 menit	5 menit				5 menit	100%			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,288,694,470	162,198,228	4.7%			
												Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49,999,960		0.00%			
												Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49,999,960		0.0%			
												Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,025,854,450	147,594,000	14.4%			
												Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	119,999,450		2.9%			
												Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	905,855,000	147,594,000	0.0%			
												Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	122,843,060	10,754,228	0.0%			
												Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	122,843,060	10,754,228	8.75%			
												Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	89,997,000	3,850,000	4.28%			
												Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	89,997,000	3,850,000	4.28%			
		Persentase gangguan/konflik yang tertangani	Persentase gangguan/konflik yang tertangani							100%				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	1,458,975	0.2%	
														Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	1,458,975	0.2%	

										Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	711,022,000	1,458,975	0.2%	
										PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,816,083,966	63,547,000	3.50%	
										Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik	1,816,083,966	63,547,000	0.0%	
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	812,999,966	-	0.0%	
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,003,084,000	63,547,000	6.34%	
										PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	113,950,000	-	0.00%	

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaani bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	113.950.000	-	0,00%	
Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	113.950.000	-	0,00%	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	500.342.000	44.037.300	8,80%	
Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	500.342.000	44.037.300	8,80%	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500.342.000	44.037.300	8,80%	

Padang Panjang, 1 April 2025
 KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH,
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG



PUTU VENDA, S.STP, M.Si
 NIP. 19770522 199511 1001

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL
TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi				Realisasi s/d triwulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi	Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Anggaran	Triwulan II 2025	%	Ket	
				I	II	III	IV							Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum	Respon time Tanggap Darurat	5 menit	5 menit				5 menit	100%			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,288,694,470	343,517,678	9.6%		
												Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49,999,960		0.00%		
												Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49,999,960	-	0.0%		
													Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,025,854,450	326,939,450	31.9%	
													Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	119,999,450		2.9%	
													Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	905,855,000	326,939,450	0.0%	
													Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	122,843,060	10,754,228	0.0%	
													Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	122,843,060	10,754,228	8.75%	
													Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	89,997,000	5,824,000	6.47%	
													Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	89,997,000	5,824,000	6.47%	
		Persentase gangguan/konflik yang tertangani	Persentase gangguan/konflik yang tertangani						100%			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	52,840,325	7.4%		
											Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	52,840,325	7.4%			

										Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	711,022,000	52,840,325	7.4%	
										PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,816,083,966	1,112,122,056	61.24%	
										Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik	1,816,083,966	1,112,122,056	88.9%	
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	812,999,966	722,376,456	88.9%	
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,003,084,000	389,745,600	38.85%	
										PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	113,950,000	-	0.00%	
										Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	113,950,000	-	0.00%	

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL
TRIWULAN III TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi				Realisasi s/d triwulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi	Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Anggaran	Triwulan III 2025	%	Ket	
				I	II	III	IV							Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum	Respon time Tanggap Darurat	5 menit	5 menit				5 menit	100%			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,288,694,470	528,997,002	14.4%		
												Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49,999,960		0.00%		
													Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49,999,960	-	0.0%	
													Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,025,854,450	503,987,200	49.1%	
													Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	119,999,450		4.7%	
													Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	905,855,000	503,987,200	0.0%	
													Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	122,843,060	17,211,802	0.0%	
													Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	122,843,060	17,211,802	14.01%	
													Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	89,997,000	7,798,000	8.66%	
													Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	89,997,000	7,798,000	8.66%	
		Persentase gangguan/konflik yang tertangani	Persentase gangguan/konflik yang tertangani						100%			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	619,583,850	87.1%		
												Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	619,583,850	87.1%		

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	711,022,000	619,583,850	87.1%	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,816,083,966	1,358,852,433	74.82%	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik	1,816,083,966	1,358,852,433	97.5%	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	812,999,966	792,815,216	97.5%	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,003,084,000	566,037,217	56.43%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	113,950,000	-	0.00%	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaani bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	113,950,000	-	0.00%	

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi				Realisasi s/d triwulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi	Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV 2025	%	Ket		
				I	II	III	IV							Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18		
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum	Respon time Tanggap Darurat	5 menit	5 menit				5 menit	100%			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,288,694,470	854,931,922	38.1%			
												Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49,999,960	27,086,000	27.09%			
													Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	49,999,960	27,086,000	54.2%		
													Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,025,854,450	760,723,050	74.2%		
													Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	119,999,450	-	5.7%		
													Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	905,855,000	760,723,050	0.0%		
														Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	122,843,060	21,048,692	0.0%	
														Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	122,843,060	21,048,692	17.13%	
														Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	89,997,000	46,074,180	51.20%	
														Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	89,997,000	46,074,180	51.20%	
		Persentase gangguan/konflik yang tertangani	Persentase gangguan/konflik yang tertangani						100%			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	699,349,850	98.4%			
												Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711,022,000	699,349,850	98.4%			

											Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	711,022,000	699,349,850	98.4%	
											PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,816,083,966	2,004,621,602	110.38%	
											Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik	1,816,083,966	2,004,621,602	97.5%	
											Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	812,999,966	792,815,216	97.5%	
											Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,003,084,000	1,211,806,386	120.81%	
											PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	113,950,000	74,193,400	65.11%	
											Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	113,950,000	74,193,400	0.00%	

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL
BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
A.	Perencanaan Kinerja								
1	Memformalkan dokumen rencana strategis sebelum di unggah pada website ers.menpan.go id.	Telah di perbaiki dokumen rencana strategis sebelum di unggah	1 Dokumen	B06	Kepala Badan	Selesai	Telah diupload		https://drive.google.com/file/d/1-EXTz3pmzL0xN9DFIOs_zjJV9Sd9b_31P/view?usp=drive_link
2	Mengutamakan penggunaan target kinerja sasaran yang berorientasi hasil (Outcome)	Telah diperbaiki target kinerja sasarnya berorientasi hasil (outcome)	100%	B06	Kepala Badan	Selesai	Sudah berorientasi pada hasil (outcome)		https://docs.google.com/spreadsheets/d/16gPuL_RTKg-fZ9Fky67jxMG1ILcNU-zQrP8h3BTD0GgU/edit?usp=drive_link
3	Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Telah diperbaiki penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional	1 Dokumen	B05	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah diperbaiki	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5gvO9a2--O5thyEBYO1Ot1r4Plbo5dFeZ0CmS9o2g8/edit?usp=drive_link
4	Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melibatkan adanya potensi croscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar organisasi dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Telah di lakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja melibatkan adanya potensi Croscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar organisasi dan pihak-pihak lainnya	1 Dokumen	B06	Kepala Badan		Bahan sudah diperbaiki		https://drive.google.com/file/d/1vzqFPhZHUh7Ucsxw55LubRUg_aKU7SG/view?usp=drive_link

	5	Melakukan pemantauan terhadap Rencana Aksi Kinerja secara berkala	Telah dilakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang setiap level organisasi	1 Dokumen	B01, B04, B07, B10, B11	Kepala Dinas	Selesai	Bahan sudah tersusun	-	https://drive.google.com/file/d/1-g1cEtmB8G9LXToy4C9pTRCb2pcuMcZt/view?usp=drive_link
B	Pengukuran Kinerja									
	1	Mencantumkan definisi operasional pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	Telah di cantumkan definisi operasional di dokumen IKU	1 Dokumen	B01, B05	Kepala Badan	Selesai	Bahan sudah dicantumkan		https://drive.google.com/file/d/13g5g4XWXI45hN_nWX574-iWInbPmqSxn/view?usp=drive_link
	2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja	Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	1 Dokumen	B06	Kepala Badan	Selesai	Bahan sudah tersusun		https://drive.google.com/file/d/13g5g4XWXI45hN_nWX574-iWInbPmqSxn/view?usp=drive_link
	3	Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala	1 Laporan	B01 - B12	Kepala Dinas	Selesai	Pemantauan capaian kinerja secara fisik dan keuangan		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rn3wh_oO85lmFSvW5NEdyQ8dY88V3oG1SjZPRf29!Ps/edit?usp=drive_link
	4	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja	1 Laporan	B03, B0	Kepala Badan	Selesai	Telah memberikan Peringatan pada ASN yang tidak disiplin.	-	https://drive.google.com/file/d/10t3sfykgeW7lzcBllbRIPK_iJUd4BkiW/viaw?usp=drive_link

	5	Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id	Telah diunggah laporan kinerja dan data pendukung melalui esr.menpan.go.id	1 Aplikasi	B01, B04, B07, B10	Kepala Dinas	Selesai	Telah diupload	-	https://drive.google.com/file/d/1tJdJq3yDIQZCY4d6bVepZZsvQB61CBEW/view?usp=drive_link
C	Pelaporan Kinerja									
	1	Menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	telah menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	1 laporan	B06	Kepala Badan	Selesai	Laporan Kinerja telah direviu dan diperbaiki	-	https://drive.google.com/file/d/11d2iiz911bMFj7ttN45MrOCJoAntG0m4/view?usp=drive_link
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal									
	1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP	Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	2 laporan	B02	Kepala Badan	Selesai	LHE dan Surat Pernyataan Reviu	-	https://drive.google.com/file/d/1kVV-5uPMClnFeJfxFnQ7WlEdmAZXep/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1jNRdw7w3JHLnltnn0avXEUolv2DjjiGh/view?usp=drive_link

Padang Panjang, 11 Juni 2025
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang



I PUTU WENDA, S.STP, M.Si
NIP. 19710522 199511 1 001